

Diplomasi Hak Asasi Manusia; Tantangan bagi Indonesia

Oleh: Sukawarsini Djelantik

Abstrak

Diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bidang kajian baru diplomasi yang berkembang seiring dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Media massa berperan sangat signifikan dalam menyebarkan isu-isu pelanggaran HAM kepada masyarakat internasional, selain NGO yang bergerak dibidang pembelaan HAM dan memiliki jaringan di seluruh dunia. Berbeda dengan masa lalu ketika masalah HAM masih dipandang sebagai masalah internal suatu negara, era globalisasi memungkinkan informasi pelanggaran-pelanggaran HAM diketahui masyarakat dunia secara luas dalam waktu yang hampir bersamaan dengan terjadinya pelanggaran tersebut. Kepedulian masyarakat internasional diwujudkan dengan dimungkinkannya intervensi kemanusiaan untuk melindungi hak hidup dan hak rasa aman setiap manusia. Tulisan ini membahas berbagai aspek diplomasi HAM dalam kaitannya dengan penerapan diplomasi HAM Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi.

Kata kunci : hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, diplomasi, pelanggaran HAM, keamanan ekonomi, keamanan manusia.

1. Pendahuluan

Perubahan mendasar dalam politik internasional pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1990an memunculkan isu-isu baru dan aktor-aktor baru dalam diplomasi. Masyarakat internasional tidak hanya tertarik terhadap masalah-masalah yang terkait dengan politik dan keamanan, tetapi telah mengembangkan perhatian kepada isu-isu kemanusiaan, seperti pengarus-utamaan gender (*gender mainstreaming*), konservasi lingkungan hidup, demokratisasi, pemerintahan yang baik (*good governance*), HAM.

Perhatian terhadap HAM telah meningkatkan kesadaran terhadap pemakaian diplomasi untuk membela HAM. Rein Mullerson, mendefinisikan diplomasi HAM sebagai "pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri

untuk tujuan mempromosikan hak asasi manusia, selain memakai isu-isu hak asasi manusia untuk mengejar tujuan-tujuan politik luar negeri".¹

Lebih lanjut Mullerson menyatakan bahwa:

Diplomasi HAM aktif bertujuan untuk mencapai perubahan nyata dalam kondisi HAM di negara-negara lain. Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap penegakan HAM di dalam negerinya, selain memiliki warga negara yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi dapat menerapkan diplomasi HAM yang koheren dan asertif sebagai bagian dari politik luar negerinya".²

¹ Rein Mullerson, 1997, Human Right Diplomacy, Routledge, NY, hal. 6.

² Ibid.

